



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik

Tresita Wahyuningsih<sup>1</sup>, Syariatun Hasanah<sup>2</sup>, Qiya Albadani<sup>3</sup>, Miranda Alawiyah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Univeritas Mataram, Mataram, Indonesia, [tresitaw@gmail.com](mailto:tresitaw@gmail.com),

<sup>1</sup>Univeritas Mataram, Mataram, Indonesia, [syariatunh@gmail.com](mailto:syariatunh@gmail.com),

<sup>1</sup>Univeritas Mataram, Mataram, Indonesia, [qiyaalbadani@gmail.com](mailto:qiyaalbadani@gmail.com),

<sup>1</sup>Univeritas Mataram, Mataram, Indonesia, [Mirandaala05@icloud.com](mailto:Mirandaala05@icloud.com)

**Abstrak:** Korupsi adalah persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Tindakan korupsi yang meluas tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, melemahkan institusi demokrasi, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan politik, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi secara sistematis. Penelitian ini memiliki nilai akademis sebagai referensi ilmiah, dan secara praktis dapat membantu pembuat kebijakan serta masyarakat dalam merumuskan strategi antikorupsi yang tepat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengacu pada laporan resmi, jurnal ilmiah, data statistik, dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa korupsi menurunkan efisiensi anggaran, menghambat investasi, serta memperburuk kualitas infrastruktur dan layanan. Di bidang politik, korupsi berdampak pada lemahnya demokrasi, rendahnya partisipasi publik, dan meningkatnya potensi ketidakstabilan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi merupakan langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

**Kata Kunci :** *Pemberantasan, korupsi, pidana, ekonomi, politik.*

**Abstract:** Corruption is a serious issue that hinders economic growth and political stability, particularly in developing countries like Indonesia. Widespread corruption not only causes financial losses to the state but also degrades the quality of public services, weakens democratic institutions, and erodes public trust in the government. This study aims to analyze the impact of corruption on economic and political development, and to provide policy recommendations that can help reduce corruption systematically. The research offers academic value as a scientific reference and practical relevance for policymakers and the public in formulating effective anti-corruption strategies. A descriptive qualitative method is used with a literature study approach, based on reports from anti-corruption agencies, scholarly journals, official statistics, and policy documents. The findings reveal that corruption reduces budget efficiency, discourages investment, and worsens the quality of infrastructure and public services. Politically, corruption weakens democracy, lowers public participation, and increases the risk of governmental instability. Therefore, combating corruption is a crucial step in achieving sustainable development and ensuring a transparent and accountable government.

**Keywords :** *Eradication, corruption, crime, economy, politics*

<b>*Correspondence Address:</b>	<a href="mailto:tresitaw@gmail.com">tresitaw@gmail.com</a>
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 September 2025

## PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Di masa ini, masalah korupsi di Indonesia tidak ada habis-habisnya untuk dibicarakan oleh publik, terutama oleh media massa baik lokal maupun nasional. Banyak pakar dan masyarakat umum mengemukakan pendapatnya mengenai isu ini. Pada dasarnya, pendapat mereka ada yang memiliki titik temu, namun tidak jarang pula terjadi perbedaan tajam. Akan tetapi, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa korupsi merugikan negara dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pada hakikatnya, korupsi merupakan “benalu sosial” yang melemahkan struktur pemerintahan dan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Korupsi sangat sulit diberantas karena terbatasnya bukti hukum yang akurat dan lemahnya sistem pendeteksian berbasis aturan hukum. Korupsi merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat. Fenomena ini muncul sebagai hasil dari budaya yang menjadikan uang sebagai standar kebenaran dan simbol kekuasaan mutlak.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah kronis yang melahirkan lingkaran setan kemiskinan, ketimpangan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut *Sari* (2020), korupsi menyebabkan pengalihan sumber daya publik ke pihak tertentu yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini mengakibatkan kualitas hidup masyarakat memburuk dan memperbesar kesenjangan sosial. *Transparency International* (2023) juga mencatat bahwa persepsi korupsi yang tinggi berkorelasi langsung dengan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Korupsi sering kali muncul akibat tekanan kebutuhan pembangunan yang mendesak, sementara proses birokrasi berjalan lambat dan tidak efisien. Kondisi ini mendorong individu maupun lembaga untuk mencari jalan pintas melalui praktik suap atau pemberian uang pelicin. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, praktik semacam ini akan terus berulang dan melahirkan kelompok pegawai yang memperkaya diri sendiri, yang dikenal sebagai orang kaya baru (OKB). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara optimal, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif dan represif.

Salah satu strategi pencegahan yang dianggap efektif adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*). Nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dapat menjadi landasan moral dalam membentuk budaya antikorupsi yang kuat. Maka dari itu, diperlukan langkah konkret dalam merumuskan strategi penguatan kearifan lokal yang masih hidup di masyarakat, sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

## METODE | METHOD

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan politik. Metode ini dipilih karena korupsi adalah fenomena kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan negara. Menurut *Lexy J. Moleong* (2013), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menganalisis laporan lembaga antikorupsi, jurnal ilmiah, buku, serta data

statistik dari sumber resmi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi serta stabilitas politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

## **A. Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Politik**

Korupsi yang merajalela berdampak serius terhadap pembangunan, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Dalam dunia politik, korupsi merusak demokrasi dan tata pemerintahan yang baik karena menghancurkan proses formal. Korupsi pada pemilu dan lembaga legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan rakyat, serta menghambat penegakan hukum di sistem peradilan. Selain itu, korupsi di pemerintahan publik menyebabkan ketimpangan layanan masyarakat dan menurunkan legitimasi serta nilai-nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Secara umum, korupsi melemahkan kapasitas lembaga pemerintah dengan mengabaikan prosedur, menyedot sumber daya, serta mendorong promosi pejabat berdasarkan kedekatan, bukan prestasi. Akibat empiris-sosiologis korupsi mencakup pemborosan sumber daya, larinya modal, ketidakstabilan sosial-politik, hingga potensi kudeta militer. *Simanjuntak* (2003) menyatakan bahwa korupsi menyebabkan ketidakefisienan, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dampak ekonomi dari korupsi tidak kalah merugikan. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan ketidakefisienan tinggi. Dalam sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya niaga akibat suap, pungutan liar, serta risiko pembatalan kontrak. Meski ada anggapan bahwa korupsi dapat mempercepat birokrasi, Teguh Dananto (2011) menyatakan bahwa sogokan justru mendorong munculnya peraturan dan hambatan baru. Korupsi juga mengacaukan persaingan usaha karena perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi, sementara yang tidak efisien tetap bertahan. Di sektor publik, korupsi mengalihkan investasi ke proyek-proyek yang rentan praktik sogok, mengurangi pemenuhan standar keselamatan dan lingkungan, serta menambah beban anggaran negara.

Secara luas, korupsi merusak hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ekonomi, korupsi memperlambat pertumbuhan dengan menurunkan arus investasi, meningkatkan biaya transaksi, dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Korupsi juga mengurangi pendapatan negara melalui penggelapan pajak dan proyek fiktif, serta meningkatkan utang yang tidak produktif. Proyek-proyek infrastruktur menjadi lambat dan berkualitas buruk, menghambat pembangunan. Dari sisi politik, korupsi mengutamakan kepentingan pribadi di atas publik dan menghalangi akses rakyat miskin terhadap manfaat pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi memerlukan tata pemerintahan yang transparan, integritas nasional, reformasi hukum, serta pengawasan yang ketat. Masyarakat sipil berperan penting dalam mengawal perubahan ini dengan memilih pemimpin berintegritas dan mengawasi kebijakan publik.

## **B. Penyebab Terjadinya Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Politik**

### **1. Moral dan Integritas yang Lemah**

Korupsi terkait erat dengan lemahnya moral individu. Ketika seseorang tidak memiliki nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik, maka ia cenderung mudah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Lemahnya pendidikan karakter, lingkungan keluarga yang permisif, serta minimnya teladan dari pemimpin turut memengaruhi pembentukan integritas seseorang.

### **2. Gaji dan Kesejahteraan yang Rendah**

Pegawai negeri atau pejabat publik yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya rentan tergoda melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi. Dalam beberapa kasus, mereka merasa "terpaksa" melakukan korupsi karena sistem tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai.

3. Pengawasan yang Lemah

Ketika sistem pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan efektif, maka pelaku korupsi merasa bebas melakukan tindakan korup tanpa takut diketahui. Misalnya, tidak adanya audit rutin, tidak adanya sistem transparansi yang baik, atau lemahnya peran lembaga pengawas seperti Inspektorat, BPK, dan KPK.

4. Budaya dan Kebiasaan yang membiarkan dalam beberapa lingkungan

Dalam beberapa lingkungan, korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak lagi dipandang sebagai kejahatan besar. Ada anggapan bahwa "semua orang juga melakukannya", atau "asal tidak ketahuan tidak apa-apa". Budaya seperti ini sangat berbahaya karena membentuk sikap permisif dan kolektif terhadap tindakan yang merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat.

5. Kurangnya penegak Hukum

Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan tegas, maka korupsi akan semakin merajalela. Ketika pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, atau bahkan bisa bebas karena suap dan kolusi, maka ini akan menciptakan efek jera yang rendah. Hukum yang tebang pilih juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan.

6. Kesempatan dan Kekuasaan yang Besar

Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula potensi korupsi jika tidak disertai pengawasan. Jabatan yang memiliki kewenangan besar dalam mengatur anggaran, izin usaha, atau kebijakan publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

**C. Cara Menanggulangi dan Membrantas Korupsi**

Untuk mengatasinya, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan dengan menggabungkan pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Upaya preventif mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik, pelaporan anggaran secara terbuka, serta penerapan sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini guna membentuk karakter generasi yang berintegritas.

Pendekatan represif melibatkan penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK agar independen dan berdaya, serta reformasi sistem peradilan agar pelaku korupsi dapat ditindak tegas tanpa pandang bulu. Reformasi politik pun menjadi hal penting, seperti pendanaan partai politik yang transparan, pemilu yang jujur dan adil, serta pemberian sanksi berat bagi pejabat publik yang korup.

Tak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan penganggaran publik, serta dukungan terhadap jurnalisme investigatif sebagai bagian dari kontrol sosial. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif demi mewujudkan pembangunan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

**KESIMPULAN | CONCLUSION**

Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan politik demokratis. Dalam ekonomi, korupsi menghalangi distribusi sumber daya yang adil, sehingga sektor riil tidak berkembang, lapangan kerja terbatas, dan kualitas hidup rendah. Dalam politik, korupsi menghalangi akses rakyat dan reformasi pemerintahan. Penanggulangan korupsi secara preventif meliputi pengembangan etika pejabat, peningkatan kesejahteraan, dan sosialisasi sanksi berat. Secara

represif, dilakukan dengan hukuman pidana berat, pengembalian kerugian negara, publisitas pelaku korupsi, dan sanksi sosial dari masyarakat.

## REFERENSI | REFERENCE

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habitiasi nilai-nilai karakter sebagai perilaku anti korupsi pada masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Andvig, J. C., & Fjeldstad, O. H. (2001). Corruption: A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute. <https://www.cmi.no/publications/2001/rep-r-2001-7.pdf>
- Dewi, A. S. (2019). Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 155–170. <https://doi.org/10.25077/jisp.8.2.155-170.2019>
- Danar, D. (2024). Dampak negatif tindak pidana korupsi dalam terwujudnya stabilitas nasional. *Maleo Law Journal*, 8(1), 50–64.
- Haryanto, T. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Hukum dan Sosial Budaya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 45–62.
- Klitgaard, R. (1998). Controlling Corruption. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan Tahunan KPK 2022. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-tahunan>
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(2), 40–59.
- Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press.
- Suryono, A. (2018). Budaya Lokal dalam Mencegah Korupsi: Studi pada Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 4(1), 25–38.
- Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023.
- World Bank. (2000). Anti-Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate.